

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah sosial yang biasa juga disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial adalah salah satu diskursus polemik lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Masalah sosial yang dimaksud adalah gejala-gejala yang normal dalam masyarakat, seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat (stratifikasi sosial), pranata sosial, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, serta realitasnya.¹ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai.² Artinya PMKS merupakan kelompok masyarakat yang rentan sosial dengan kondisi yang belum sejahtera, seperti kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan pendapatan belum terpenuhi.³

Ada banyak PMKS yang tersebar di Indonesia diantaranya adalah gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta

¹Burlian, Paisol, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.1

²*Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial Sebuah Kajian Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), hlm 7.

³Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Insan Akademika, 2012), hlm. 1

mengembara di tempat umum.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang miskin dan anak terlantar dapat dipelihara oleh negara.⁵ Berdasarkan informasi dari laman sindonews.com, ada sekitar 3 juta PMKS di Indonesia, dengan 28.000 berada di Jakarta. Sebanyak 77.500 gelandangan dan pengemis tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia tahun 2019. Pada wilayah perkotaan apalagi dalam Ibukota Provinsi seperti salah satu Ibukota provinsi yang berada di Indonesia yaitu wilayah Kota Jambi yang merupakan pusat kota Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 619.600 jiwa pada tahun 2022. juga memiliki masalah sosial, bahkan sudah sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan.⁶

Persoalan sosial di Kota Jambi masih perlu perhatian, khususnya gelandangan. Hampir setiap sudut jalanan di Kota Jambi tampak masalah sosial tersebut. Hal ini akan lebih ramai saat mendekati hari raya Idul Fitri. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi Jefri Zen, kebanyakan kasus di jalanan itu bukan merupakan warga asli Jambi, Mereka banyak pendatang dari provinsi tetangga.⁷ Pada tanggal 19 April 2022 Dinas Sosial Kota Jambi akui PMKS belum teratasi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan, di bulan Ramadan persoalan PMKS makin ramai, hal itu disebabkan karena kebiasaan masyarakat

⁴*Ibid.* hlm.13-14.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 34 Ayat (1)

⁶Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi dalam Angka, 2022

⁷Jambiprima.com, 2022, Anak Jalanan dan Gepeng Makin Ramai Saat Ramadhan di Kota Jambi, <https://jambiprima.com/read/2022/04/08/14660/anak-jalanan-dan-gepeng-makin-ramai-saat-ramadhan-di-kota-jambi>, diakses 09 Maret 2023.

jambi yang ramah dan mudah bersedekah saat bulan ramadan⁸ dan fenomena lain yang terjadi yaitu pada tanggal 1 agustus 2023 dinsos kota jambi ungkap indikasi jaringan gepeng tersistem, 5 jam dapat Rp250 ribu. berdasarkan hasil evaluasi dari penindakan terhadap pelaku PMKS yang telah dilakukan dinsos. Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial kota jambi, Rifki mengungkapkan contoh kasus waktu mengamankan satu dari mereka tidak berselang lama, dalam sebuah penertiban satu dari mereka tertangkap lagi, namun dengan pasangan yang berbeda. Dan kepada petugas si penuntun mengaku dirinya hanya membantu sebagai tetangga, Ada juga yang mengatakan hanya disuruh dalam artian disuruh bisa saja ada yang mengakomodir, bisa jadi ada sindikat disini, seperti sudah tersistem. Parahnya jumlah mereka terus bertambah dikota jambi ini. Dan Rifki menuturkan dalam hitungan jam, aktivitas pukul 16:00-21:00 WIB, mereka sudah bisa mendapatkan uang mencapai Rp250 ribu.⁹ Dari kondisi tersebut pemerintah Kota Jambi kembali membuat suatu kebijakan untuk mengatasi PMKS di Kota Jambi, salah satunya adalah penanganan gelandangan.

Kebijakan yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Kepada PMKS, dan meningkatkan Perlindungan Sosial Terhadap PMKS. Adapun Kebijakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019-2023 yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁰

⁸IMCNews.ID, Jambi, 2022, Dinsos Kota Jambi Akui PMKS Belum Teratasi. <https://imcnews.id/read/2022/04/19/19173/dinsos-kota-jambi-akui-pmks-belum-teratasi/>

⁹JAMBITODAY.CO.ID,JAMBI, 2023, 5 Jam Dapat Rp250 Ribu, Dinsos Kota Jambi Ungkap Indikasi Jaringan Gepeng Tersistem. <https://www.jambitoday.co.id/5-jam-dapat-rp250-ribu-dinsos-kota-jambi-ungkap-indikasi-jaringan-gepeng-tersistem/>

¹⁰Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi, 2019-2023.

- a. Peningkatan kesejahteraan sosial dan Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial melalui Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, menyiapkan bantuan terhadap PMKS berupa panti sosial anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak. Serta kerjasama dan memfasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia.¹¹

- b. Peningkatan Pembinaan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Partisipasi masyarakat yang optimal sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PMKS.

Para gelandangan, anak jalanan dan lanjut usia terlantar yang terjaring razia diberikan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Jambi ditempatkan sementara di Rumah Singgah. Dinas Sosial Kota Jambi melaksanakan pendataan dan bimbingan mental sosial dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan penertiban dan penanganan masalah penyakit sosial meliputi Razia, pembentukan kelompok usaha Bersama bagi PMKS yang telah dilakukan pembinaan sosial dan keterampilan serta memberikan bantuan modal kerja.¹²

- c. Peningkatan fungsi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial.

¹¹*Ibid.* hlm. 29.

¹²*Ibid.* hlm. 29.

Pada Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi melakukan pelayanan bidang pemberdayaan sosial dengan memberikan bimbingan teknis dan supervise pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), serta melakukan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.¹³

Dari seluruh kategori PMKS, maka penulis hanya memfokuskan pada gelandangan yang ada di wilayah Kota Jambi, sehingga data yang diambil adalah data jumlah gelandangan dan bukan termasuk pengemis. Adapun jumlah gelandangan yang ada di Kota Jambi selama tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Gelandangan di Dinas Sosial Kota Jambi 2019-2022

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2019	196
2	2020	-
3	2021	116
4	2022	223
	Jumlah	535

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasanya jumlah gelandangan di Kota Jambi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah gelandangan tidak terdata karena pada saat itu kondisi pandemi covid-19, sehingga tidak ada penertiban dan pendataan terhadap gelandangan. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari 196 orang menurun menjadi 116 orang di tahun

¹³*Ibid.* hlm. 30.

2021, sedangkan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 223 orang. Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengambil fokus penelitian pada gelandangan karena jenis PMKS ini merupakan PMKS dengan jumlah terbanyak di Kota Jambi berdasarkan data yang disajikan oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 bahwa bentuk penanganan oleh pemerintah kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial Kota Jambi melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif.¹⁴ Berdasarkan laporan kinerja (LAKIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022, dari penyelenggaraan program kegiatan pemerintahan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Jambi khususnya dalam bidang Sosial, terdapat beberapa permasalahan pokok dan memerlukan solusi pemecahan yang terjadi antara lain belum optimalnya penanganan dan penertiban razia PMKS terlihat dari masih banyaknya PMKS yang berkeliaran di pinggir jalan raya, belum optimalnya pemberian bantuan usaha kepada PMKS, tidak tercapainya pencapaian tersebut dikarenakan aktivitas program yang belum optimal meskipun sasaran program sudah terjangkau, dan banyaknya PMKS yang berasal dari luar daerah, terlihat saat tertangkap razia banyak yang berasal dari daerah lain.

Beberapa kajian dari penelitian sebelumnya yang pernah diangkat yaitu penelitian Sagita (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi di Dinas Sosial Kota Jambi)¹⁵, indikator kebijakan implementasi yang digunakan yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas

¹⁴Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan, Bab III Penanganan.

¹⁵Sagita, Hikmah, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi di Dinas Sosial Kota Jambi)", *Skripsi*, UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Syariah, 2021

pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan yang terjadi di lapangan masih terjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, ini dibuktikan oleh data anak jalanan mengalami naik turun setiap tahunnya dan diperlukan ketegasan dari pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan anak jalanan dalam jangka waktu panjang untuk merealisasikan kebijakan ini menjadi lebih baik kedepannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Jambi telah sesuai dengan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku namun dalam tahap pembinaan masih belum efektif karena masih ada kendala yang terjadi dilapangan. Untuk mengatasi persoalan tersebut semestinya pemerintah kota jambi melalui Dinas Sosial tidak hanya melakukan sosialisasi dan pembinaan saja namun disertai tindakan tegas dan efek jera agar para anak jalanan mau mengikuti aturan yang ada dan tidak kembali kejalanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada anak jalanan, dan teori yang digunakan adalah teori karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada gelandangan, serta teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III.

Kemudian penelitian Riri Maria Fatriani dkk (2024) yang berjudul Kota Ramah Anak: Konstelasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Jambi¹⁶. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eskalasi kekerasan terhadap anak di Kota Jambi

¹⁶Riri Maria Fatriani., D.A. Vayed, dan R.A. Prayoga, Kota Ramah Anak: Konstelasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Jambi, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2024

mengalami peningkatan, terutama penelantaran dan kekerasan fisik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kasus dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai 52 kasus. Kasus ini didominasi oleh pemicu masalah keuangan dan gangguan emosi. Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Jambi telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2017, membentuk satuan tugas integratif program kesejahteraan sosial anak Kota Jambi. Gugus tugas ini memiliki kewenangan, yaitu pertama, upaya preventif dan pengurangan resiko masalah kesejahteraan anak. Kedua, mengoptimalkan layanan pengaduan dan/atau rujukan terkait masalah kesejahteraan sosial anak. Ketiga, bantuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terkait masalah kesejahteraan sosial anak. Keempat, advokasi implementasi sistem data dan informasi terkait masalah kesejahteraan sosial anak. Selain itu, bentuk kontrol sosial dari masyarakat dan pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya kontrol sosial preventif yaitu belum meratanya diseminasi dan distribusi Perda perlindungan anak di Kota Jambi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan untuk perlindungan anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada implementasi kebijakan untuk menangani gelandangan,

Terakhir penelitian Forwanti (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)¹⁷, dalam penelitian ini implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial

¹⁷Forwanti, Eva, "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 8 No 2 Tahun 2022

Kota Palangka Raya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yaitu: 1). Standar dan sasaran; 2). Sumber daya; 3). Komunikasi antar badan pelaksana; 4). Karakteristik organisasi; 5). Disposisi; 6). lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasari dari hanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, sosialisasi serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perda No. 9 Tahun 2012 adalah pelaku gelandangan pengemis yang sama dan masih belum terlaksananya dari indikator sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana serta lingkungan eksternal yang belum terlaksana dengan baik. Untuk faktor pendukungnya yaitu masyarakat tidak menolak dengan adanya kegiatan sosialisasi dan petugas keamanan dari pasar besar tersebut sangat mendukung dengan adanya kegiatan itu dan terlaksana dengan baik indikator standar dan sasaran kebijakan serta indikator karakteristik badan pelaksana dan disposisi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada gelandangan dan pengemis, dan teori yang digunakan adalah teori Standar dan sasaran, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik organisasi, Disposisi, lingkungan sosial, ekonomi serta politik dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada gelandangan, serta teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III.

Dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam menangani PMKS di atas menunjukkan masih adanya kekurangan dan juga berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis ingin membuat penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Penanganan Gelandangan (Studi di Dinas Sosial Kota Jambi)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan gelandangan di Dinas Sosial Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan gelandangan di Dinas Sosial Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, makatujuan yang dicapai dalam penelitan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan gelandangan di Dinas Sosial Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan gelandangan di Dinas Sosial Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dalam menambah pengalaman dan juga penerapan ilmu pada proses pembelajaran yang diperoleh selama ini.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan referensi mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan Gelandangan di Kota Jambi.

3. Bagi Akademis

Memberikan sumber informasi dan menyampaikan informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan Gelandangan di Kota Jambi.

1.5. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori implementasi, implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan,

pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.¹⁸ Menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:¹⁹

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Pada penelitian ini fenomena yang diteliti lebih ditekankan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Penanganan Gelandangan (Studi di Dinas Sosial Kota Jambi). Fenomena yang akan digunakan antara lain:

1) *Komunikasi*

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi kebijakan.²⁰ Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.²¹

¹⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung; Penerbit Pustaka Setia, 2018), hlm.249

¹⁹ *Ibid.* hlm. 249.

²⁰ *Ibid.* hlm. 250.

²¹ *Ibid.* hlm. 251.

a) Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).²²

b) Kejelasan

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat di implementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, di antaranya: kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan, adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut, kebutuhan mencapai consensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut, kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah, biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.²³

²²*Ibid.* hlm. 251.

²³*Ibid.* hlm. 251-252.

c) Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya: kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan, kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru, kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain, banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.²⁴

2) *Sumber Daya*

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut.²⁵

- a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c) Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus kemeja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh

²⁴*Ibid.* hlm. 252

²⁵*Ibid.* hlm. 252

dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain

- d) Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.²⁶

3) *Disposisi*

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.²⁷ Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:²⁸

- a) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh

²⁶*Ibid.* hlm. 252-253

²⁷*Ibid.* hlm. 253

²⁸*Ibid.* hlm. 253

masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

- b) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidak berpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

4) *Struktur Birokrasi*

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ada kalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.²⁹

Implementasi dianggap sebagai hal yang tidak problematis dalam pengertian kebijakan, karena diasumsikan bahwa setelah diambil suatu kebijakan, maka selanjutnya perlu dilaksanakan begitu saja.³⁰ Implmentasi suatu program atau kebijakan harus merupakan suatu proses "top-down" dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh para implementor agar pelaksanaan kebijakan mereka dapat berlangsung secara lebih efektif. Akan tetapi, pendekatan ini ditentang oleh pihak yang mendukung pendekatan "bottom-up", yang memulainya dari perspektif

²⁹*Ibid.* hlm. 253-254

³⁰Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), hlm. 1

pihak-pihak yang terpengaruh dan yang terlibat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan.³¹

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.³²

Menurut Grindle, implementasi merupakan proses Tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.³³ Implementasi menurut Meter dan Horn berpandangan bahwa implementasi sebagai aktivitas yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, dan pejabat pemerintah, serta pegawai swasta yang dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi-organisasi tersebut menjalankan tugas-tugas pemerintah yang mendatangkan dampak serta manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, faktanya di lapangan sering kali pejabat publik atau organisasi pemerintahan melaksanakan tugas-tugas pemerintah tidak sesuai

³¹*Ibid.* hlm. 2

³²Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Press, 2020), hlm. 1

³³Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik;Proses, Implementasi dan Evaluasi*, (Bandung: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022), hlm.120

dengan apa yang disebutkan dalam Undang, sehingga sering kali pelaksanaan kebijakan menjadi tidak jelas.³⁴

Pentingnya implementasi kebijakan dilandasi beberapa alasan bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya permasalahan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan menggunakan faktor apa yang mendukung dan faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.³⁵ Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.³⁶

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplemetasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan (environment) yang saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan

³⁴Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Eka purnama, Kadek Wiwin, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris, Suwardi, M Doddy S A, dan Dian Sari, *Kebijakan Publik*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.67

³⁵Novita Tresiana dan Noverman Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), hlm. 11

³⁶Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 48

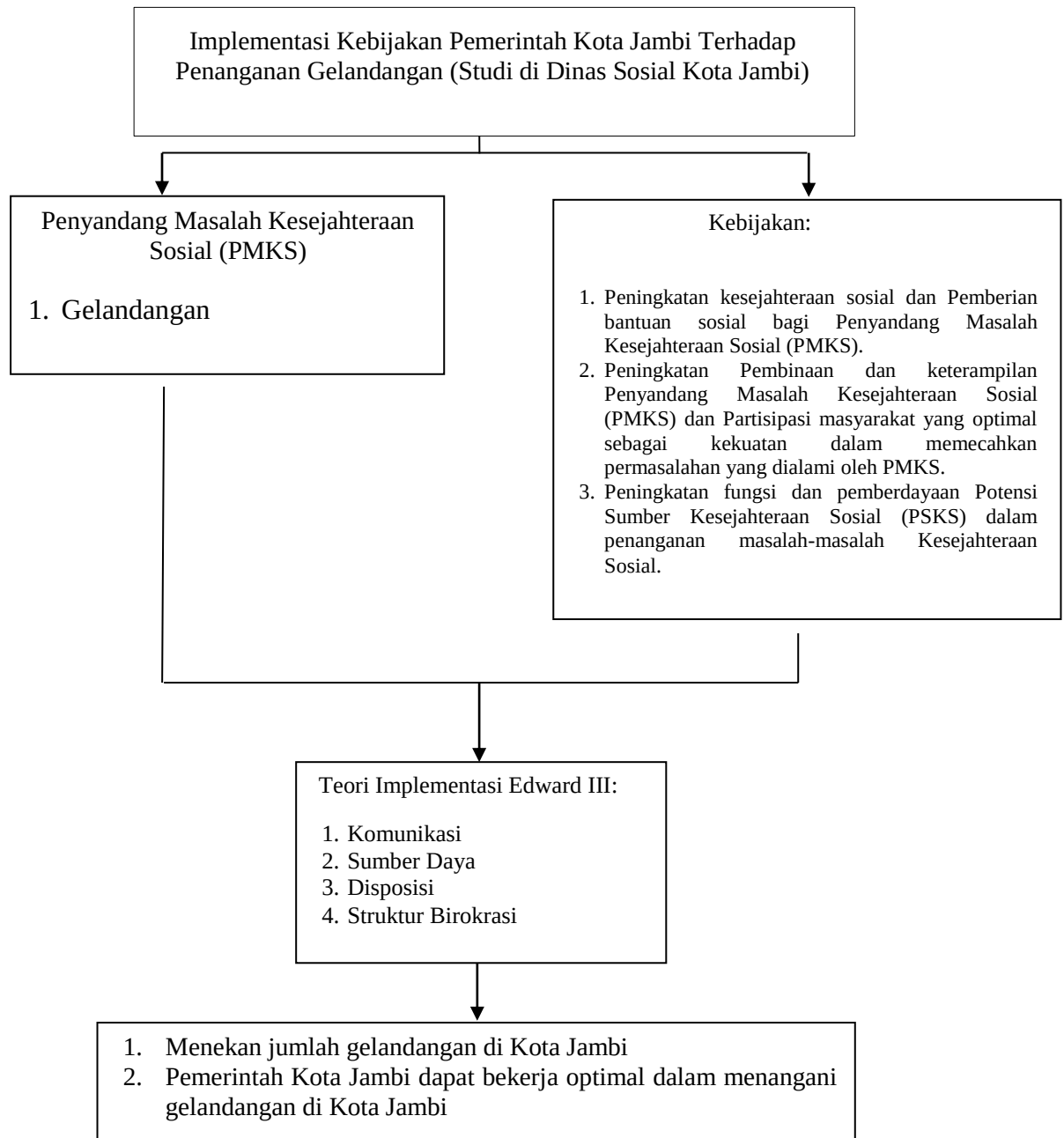
merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empirisnya.³⁷

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

³⁷*Ibid.* hlm. 48

1.6. Kerangka pikir

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7. Metode Penelitian

Menurut Syafri Harahap, metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang berkaitan dengan penjelasan tentang Teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data.³⁸ Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono, metode merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan mengemukakan hipotesis.³⁹

Metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengetahui kenyataan sebenarnya terkait permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memudahkan

³⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 7

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm.129.

penulis dalam mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang “Implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan gelandangan di Dinas Sosial Kota Jambi”.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Guna memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Jambi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Nomor 156, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Selanjutnya penelitian ini juga dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Penulis juga melakukan penelitian dengan pengamat poltiik Kota Jambi melalui sambungan telephone, serta wawancara dengan gelandangan yang dilakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu di komplek pertokoan Pasar Talang Banjar Kota Jambi dan Terminal Rawasari, Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi.

1.5.3. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.⁴⁰ Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah mengenai objek yang akan diteliti. Dengan adanya batas-batas masalah yang jelas maka dapat mengarahkan dan membimbing penelitian agar lebih terarah dan terperinci. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan gelandangan di Dinas

⁴⁰*Ibid.* hlm. 55.

Sosial Kota Jambi. Alasan mengambil fokus penelitian pada gelandangan karena jenis PMKS ini merupakan PMKS dengan jumlah yang berfluktuasi di Kota Jambi berdasarkan data yang disajikan oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

1.5.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data Primer dan sumber data Sekunder:⁴¹

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴² Adapun data primer ini peneliti dapatkan langsung dari sumber aslinya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau bisa dikatakan juga data berasal dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer didapat baik melalui wawancara mendalam kepada informan atau bisa juga dari pengamatan secara langsung.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah Kota Jambi terhadap penanganan gelandangan di Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴³ Sumber data sekunder adalah data

⁴¹*Ibid.* hlm. 104.

⁴²*Ibid.* hlm.104.

⁴³*Ibid.* hlm. 104.

yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Dimana dalam hal ini didapat baik dari buku- buku, artikel, internet atau media massa yang relevan dengan fokus penelitian dan juga hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti dokumen dari Dinas Sosial Kota Jambi, literatur, jurnal, buku dan lain sebagainya.

1.5.5. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.⁴⁴ Teknik pada penelitian ini yaitu penentuan informan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.⁴⁵ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.⁴⁶ Kemudian teknik *snowball sampling* digunakan apabila dalam proses penelitian yang dilakukan informan yang telah ditentukan diawal dirasa masih kurang untuk melengkapi informasi data yang diperlukan. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁴⁷

⁴⁴*Ibid.* hlm. 91.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 95.

⁴⁶*Ibid.* hlm. 96.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 96.

Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan topic penelitian. Informan baik yang dipilih secara teknik *purposive sampling* maupun *snowball sampling*. Mereka adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara jelas tentang kebijakan pemerintah terhadap penanganan PMKS di Dinas Sosial Kota Jambi. Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 1.2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Fikri Aiman	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Budi Wahyudi, S.E	Penyuluh Sosial Ahli Muda
3	Bawalhi	Sekretaris Pelaksana Harian Satpol PP Kota Jambi
4	Wenny Ira	Pengamat Sosial
6	Amuk dan Yono	Gelandangan

1.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi:⁴⁸

a. Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴⁹ Dalam pengamatan ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti

⁴⁸*Ibid.* hlm. 105.

⁴⁹*Ibid.* hlm.106.

mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁵⁰

Observasi ini penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terkait kondisi gelandangan yang ada di wilayah Kota Jambi.

b. Wawancara

Dalam teknik wawancara kualitatif (*qualitative interview*), penulis dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹

Sederhananya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau dengan kata lain melakukan pengumpulan data bertatap muka dengan responden. Dalam wawancara alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara selain harus membawa instrument sebagai pedoman wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat seperti *tape recorder*, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁵²

Wawancara ini penulis lakukan dengan pihak-pihak yang terpilih sebagai informan, dimana informasi yang dikumpulkan

⁵⁰*Ibid.* hlm. 108.

⁵¹*Ibid.* hlm. 114.

⁵²*Ibid.* hlm. 115.

berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah Kota Jambi terhadap penanganan gelandangan di Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar. misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna anmetode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵³ Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak hanya sebatas foto, tetapi juga dokumen jumlah gelandangan, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

1.5.7. Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data yang akan dilakukan menggunakan model analisis data Miles & Hubberman mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif⁵⁴ yaitu:

⁵³*Ibid.* hlm. 124.

⁵⁴*Ibid.* hlm.132.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.⁵⁵

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁵⁶

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dalam tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

⁵⁵*Ibid.* hlm. 134.

⁵⁶*Ibid.* hlm. 137.

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁷

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.⁵⁸

1.5.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik

⁵⁷*Ibid.* hlm. 137.

⁵⁸*Ibid.* hlm. 141-142.

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁹

⁵⁹*Ibid.* hlm. 125.